



Vigilantes and Gangsters in the Borderland of
West Kalimantan, Indonesia

by Reed L. Wadley and Michael Eilenberg



ARTICLES
Kyoto Review of Southeast Asia
developed for the web by Squeakystudios Design First production, Copyright 2006

Vigilante dan Gengster di Perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia

Oleh Reed L. Wadley dan Michael Eilenberg

[Reed L. Wadley mengajar di Jurusan Anthropologi di University of Missouri-Columbia (USA). Michael Eilenberg mengajar di jurusan Anthropologi & Ethnografi di University of Aarhus (Moesgaard, Denmark).]

*Seseorang yang mudah berpindah dari satu perbatasan satu negara ke perbatasan yang lainnya tidak dapat dikatakan sebagai warga negara yang berguna bagi kedua negara yang bertetangga.*¹

Perbatasan sudah lama menjadi tempat kekerasan, sebagai hasil dari ketidakmampuan pemerintah atau lemahnya kepentingan di pinggiran, atau sebagai hasil dari upaya pemerintah mengendalikan “pemberontak” di perbatasan (Paredes 1958; Wadley 2004). Ketiadaan hukum, atau ambiguitas ruang antara hukum pemerintah, menjadi lahan subur bagi kegiatan-kegiatan tidak legal oleh satu atau beberapa negara – seperti penyelundupan dan penghindaran pajak (Tagliacozzo 2001). Wilayah perbatasan membiarkan munculnya pemimpin lokal yang bertumpu pada kegiatan-kegiatan tidak legal tersebut yang dipelihara melalui patronase dan kekerasan (McCoy 1999). Dalam situasi tersebut, orang-orang diperbatasan menikmati kebebasan dari intervensi pemerintah, yang mungkin melemahkan hubungan ambigu dengan negara (Martinez 1994a). Dalam tulisan ini, kami meneliti masalah ketiadaan hukum dan otonomi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang didiami oleh etnis Iban (Gambar 1), dengan memperhatikan vigilante dan gengsterisme,² dan bagaimana ambiguitas dan keterpisahan yang dirasakan oleh orang-orang di perbatasan.³ Vigilante dan gengsterisme merupakan

¹ Kutipan dari *Sarawak Gazette* (1 October 1895) dalam Report from Assitant Resident Burgdorffer, 2 December 1914, Verbaal 20 Augustus 1915 No. 41, Politieke Verslagen en Berichten uit de Buitengewesten van Nederlands-Indië (1898-1940), Ministerie van Koloniën, Algemeen Rijksarchief, The Hague, Netherlands [berikutnya disingkat ARA].

² Vigilantisme merujuk pada upaya mengambil atau memberikan advokasi untuk mengambil hukum kepada seseorang (yaitu menolak jalur penegakan hukum yang berlaku dan keadilan), sedangkan gengsterisme adalah tindakan kriminal terorganisasi (American Heritage Dictionary 2000).

³ Riset lapangan dan riset arsip Wadley (1998-2001) didanai oleh International Institute for Asian Studies, Leiden, The Netherlands dan di Indonesia didukung oleh Center for International Forestry Research. Penelitian lapangan Eilenberg (2002-03) didanai oleh Maintenance Grant from the Government of Denmark, dan didukung oleh Program Strata-2 Ilmu-Ilmu Sosial, Departemen Pendidikan Nasional,

fenomena umum di seluruh Indonesia, tetapi seperti yang akan lihat, konfigurasi daerah perbatasan membuat fenomena tersebut memiliki bentuknya yang unik [Gambar 1 di sini]

Dimulai pada pertengahan abad ke sembilan belas dalam upaya menekan perburuan-kepala di daerah perbatasan dan upaya mendefinisikan kewarganegaraan, Inggris dan Belanda membagi Iban Kalimantan dari populasi yang lebih luas di Serawak. Orang Iban di daerah perbatasan selalu menjadi pusat hubungan antar penjajah, dan orang Iban dapat mengambil keuntungan dari adanya perlakuan dan kondisi yang berbeda yang ditawarkan oleh para penjajah; contohnya, menggunakan perbatasan untuk menghindari pajak dan menentang otoritas penjajah (Wadley 2004). Kemerdekaan Indonesia dan pembentukan federasi Malaysia pada pertengahan abad ke 20 memperdalam pembelahan, khususnya dengan adanya militerisasi di perbatasan selama Konfrontasi pada awal 1960-an dan pemberontakan komunisme pada 1970-an. Hal itu sama sekali tidak memutuskan hubungan di antara penduduk di perbatasan di kedua belah bagian; sebaliknya, aliran pelintas perbatasan semakin meningkat seperti telah terjadi sebelumnya. Namun, pembangunan jaringan jalan di sepanjang perbatasan pada 1980-an dan 1990-an memfasilitasi peningkatan aliran manusia dan barang – legal atau tidak legal – terus-menerus di perbatasan (Wadley 1998); sebagai tambahan atas krisis ekonomi Asia dan tumbuhnya otonomi lokal pada masa sesudah jatuhnya Suharto mempertegas aliran tersebut. (Fariastuti 2002; Riwanto 2002; Siburian 2002)

Bagaimanapun, sejalan dengan letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan Indonesia, serta perbedaan pertumbuhan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia selama beberapa periode membuat Iban Kalimantan secara ekonomi lebih berorientasi ke Malaysia. Hal ini diperkuat oleh akar sejarah dan budaya di Serawak. Krisis ekonomi pada 1997 dan perubahan politik di Indonesia, termasuk de-militarisasi di perbatasan, hanya memperjelas orientasi ini. Posisi Iban di perbatasan, lebih dekat dengan tetangga yang lebih makmur dan secara politik stabil, memiliki arti bahwa kepentingan mereka sebagiannya terletak di wilayah sebelah perbatasan, tempat mereka menemukan pekerjaan sementara dan tempat untuk bermigrasi. Sebagai bagian dari lemahnya kekuasaan pemerintah pusat, maraknya kegiatan pembalakan liar juga menjadi bagian dari strategi ekonomi. Namun bagian yang paling penting dari kegiatan ini adalah pengusaha kayu keturunan Cina⁴ dengan operasi penggergajian di tingkat lokal dan pekerja Iban berasal dari Malaysia (Eilenberg 2005; Wadley and Eilenberg 2005).

Universitas Tanjungpura, Pontianak, dan studi tambahan (2005) didanai oleh WWF Verdensnaturfonden/Aase og Ejnar Danielsen Fond.

⁴ Salah seorang penilai tulisan ini mengatakan bahwa entrepreneur bukan hanya orang Malaysia, tetapi juga orang Taiwan, Korea, Filipina, Singapura, atau Indonesia. Walaupun itu benar di beberapa tempat di

Kata “tidak legal” sesungguhnya menimbulkan masalah makna. Secara khususnya ketika kata tersebut dipahami dari sudut pandang orang-orang di perbatasan, ia hanya menangkap dengan mudah gambar yang sesungguhnya amat rumit. “Tidak legal” berimplikasi pada satu perbuatan salah atau berpotensi salah, yang hanya jika digunakan kepada pemerintah, namun itu sama sekali tidak “mewakili cara-cara penduduk di perbatasan dengan bangga mengklaim kegiatan ekonomi dalam bentuk perdagangan yang melintas perbatasan” (Flynn 1997:324). Sebaliknya, walaupun mereka sangat sadar terlibat kedalam sesuatu yang didefinisikan oleh politisi sebagai menentang hukum, penduduk perbatasan mungkin sama sekali tidak melakukan kesalahan secara moral dan mereka menilai hukum tersebut tidak adil dan tak masuk akal. Maka, apa yang tidak legal seperti yang didefinisikan oleh hukum negara biasanya hanya langsung bagi pegawai pemerintah (walau mungkin mereka menghindari hukum juga). Sebaliknya bagi penduduk perbatasan yang mungkin terlibat lebih rutin dengan peraturan negara dengan lebih lentur, mereka tidak memiliki perasaan untuk mematuhi hukum yang dilihatnya sebagai sesuatu yang dipaksakan dari luar dan bertentangan dengan kepentingan mereka.⁵ Ini cukup terlihat pada operasi penggergajian kayu di daerah perbatasan sejak 1998 – dikatakan tidak legal oleh negara tetapi legal oleh komunitas lokal yang sekarang mengendalikan hutan tradisional mereka. (Kami mengakui bahwa masalah ini seharusnya tidak diartikan bahwa kami menerima perbuatan tersebut, atau juga bahwa deskripsi kami bahwa Iban secara implisit terlibat.)

Kasus 1: Vigilante

Pada awal Desember 2000, ruang sidang di Putussibau, ibu kota kecamatan Kapuas Hulu, menjadi tempat pembunuhan oleh sekelompok orang lelaki yang berjumlah sekitar 300-400. Sebagian besar dari mereka mempersenjatai diri dengan pisau dan senapan, dan mereka melakukan balas dendam atas meninggalnya saudara mereka.⁶ Korbannya seorang Melayu bernama Usnata, yang sedang dalam proses pengadilan atas tuduhan pembunuhan atas seorang Iban bernama Sandak pada Januari 2000. Sandak sehari-harinya bekerja sebagai penjual beli uang. Pembunuhan yang terjadi di ruang sidang mengagetkan media nasional sebagai tindakan pertama vigilante di ruang sidang di

Indonesia (e.g., McCarthy 2000), bos kayu di perbatasan digambarkan secara eksklusif sebagai etnis Cina dari Serawak (tetapi yang memiliki hubungan kuat dengan wilayah luar perbatasan).

⁵ Satu buku yang sedang dicetak, *Illicit Flows and Criminal Things* (Schendel and Abraham, sedang dicetak), membahas kerumitan ini secara langsung.

⁶ Polisi, yang ditugaskan untuk mencegah terjadi serangan yang diisukan ada, jumlahnya sedikit hingga berbalik. Kemudian mereka berunding dengan vigilante setelah pembunuhan dan membujuk supaya tak memotong kepala korbannya.

Indonesia, Presiden Abdurahman Wahid bertemu dengan keluarga korban, petugas di tingkat propinsi berjanji akan membawa para pelakunya ke hadapan hukum (Kompas 2000b; Pontianak Post 2000a, 2000b). Namun beberapa bulan dan tahun kemudian, kejadian tersebut “hilang dari layar radar” otoritas lokal dan nasional, dari sekian ratus orang mereka yang berpartisipasi dalam pembunuhan tadi, tak satu pun yang dituduh membunuh.

Di permukaan, kasus ini tampak seperti amuk massa, pembunuhan massal bersifat spontan karena melakukan kejahatan kecil dalam konteks sistem hukum yang tak efektif (Colombijn 2002). Tetapi struktur dan motivasi yang melandasinya, sesuatu yang tidak diperhatikan oleh media, memperlihatkan hubungan rumit antara identitas perbatasan, melemahnya kekuatan negara dan pegawai yang korup.⁷ Sandak, penjual mata uang etnis Iban, pada kenyataannya terhubung dengan Usnata melalui perkawinan, karena ia mengawini bibi Sandak. Maka sangat dimengerti ketika Sandak, dengan tas berisi uang senilai 70 juta rupiah hasil transaksi di daerah perbatasan, menggunakan perahu motor cepat bersama Usnata. Dalam perjalanan yang jauh menuju bank, Usnata dan pengemudi, seorang beretnis Padang bernama Edi, diduga membunuh Sandak dan membuang mayatnya begitu saja. Beberapa bulan kemudian mayat Sandak dapat ditemukan, dan polisi mulai mencurigai Usnata (Edi sudah meninggalkan propinsi): bukan saja karena ia merupakan orang terakhir yang melihat Sandak, tetapi juga karena ia mampu membeli barang-barang mewah setelah Sandak menghilang.

Orang-orang Iban yang merupakan saudara Sandak menginginkan Usnata membayar *pati nyawa* atau uang darah yang sejalan dengan adat Iban. Ia menolak, maka kasusnya dibawa ke pengadilan tingkat kabupaten. Setelah hari pertama pengadilan, orang Iban memutuskan untuk membunuh Usnata karena dicurigai menyuap hakim, dan mereka mengorganisasikan serangan, mengumpulkan orang-orang Iban yang berasal dari kedua perbatasan yang bertalian dengan Sandak. Sebagian dari alasan mereka, disamping balas dendam, adalah karena korupnya pengadilan dan rasa adil dari pemerintah tak mungkin didapatkan; mereka juga mengatakan bahwa Usnata menolak untuk mentaati adat Iban. Jika saja ia membayar *pati nyawa*, Usnata mungkin masih hidup. Walaupun berakar pada persepsi umum korupnya sistem pengadilan, pembunuhan balas dendam ini sangat jauh berbeda dari *amuk massa* biasa yang terjadi di Jawa, yang terjadi secara spontan ketika seseorang mengidentifikasi seorang pencopet atau penjahat kecil di jalan atau di pasar; pembunuhan *amuk massa* bersifat cepat mengikuti proses identifikasi dan tuduhan. Sebaliknya, pembunuhan Usnata sudah direncanakan dan diorganisasikan selama beberapa hari dengan mencakup orang-orang yang dimobilisasi dari jaringan sosial dan geografi yang luas. Pembunuhan tersebut terjadi di ruang pengadilan, dan inilah yang

⁷ Mengikuti cerita yang berasal dari kelompok Iban yang tak terlibat insiden.

membuatnya menjadi sangat unik. Peristiwa tadi juga melibatkan konfrontasi dengan polisi secara langsung namun tidak ada kekerasan.

Kasus 2: Gengster

Pada 1 Januari 2005, satu tim pegawai pemerintah⁸ dan seorang wartawan televisi melakukan penyelidikan atas dugaan kegiatan pembalakan liar di sekitar Taman Nasional Betung Kerihun (Antara 2005; Kompas 2005a). Enam minggu sebelum peristiwa ini, polisi menangkap tiga orang Malaysia keturunan Cina yang terlibat dalam kegiatan bisnis kayu di perbatasan dan mengambil peralatan dan kayu yang mereka temukan (Kompas 2004a), walaupun pemimpinya atau tokeinya, seorang Malaysia etnis Cina bernama Apeng (Equator Online 2004a, 2004b), lolos. Tim baru kemudian dibentuk dengan harapan mampu menangkap Apeng, tetapi menemukan kendaraan Kijang mereka dapat meneruskan perjalanan di atas jalan yang buruk. Maka mereka memakai Toyota Land Cruisers (dengan nomor polisi Malaysia) yang merupakan barang sitaan.

Setelah tim berhenti untuk bermalam dengan membuat tenda, dua kendaraan pick up dengan nomor polisi Malaysia membawa sekita 20 orang lelaki bersenjata berhenti perkemahan. Seorang Iban lokal, bertindak sebagai pemimpin kelompok, mulai melakukan interogasi tim, dan ia tampaknya tidak takut oleh anggota militer atau polisi. Setelah mengetahui bahwa tujuan tim ini dan menemukan bahwa tim memakai kendaraan sitaan, orang tadi marah dan menyalahkan anggota tim atas hilangnya pekerjaan di tingkat lokal. Ia memerintahkan para lelaki untuk merampas kendaraan, meninggalkan tim jalan kaki. Tetapi dalam situasi yang sulit, tim melakukan negosiasi mengenai transportasi ke markas polisi lokal di Lanjak, yang disetujui oleh kelompok lokal. Setibanya di Lanjak, kelompok lokal tadi menolak mengembalikan kendaraan dan menggunakannya untuk melintas batas sebelum polisi menangkap mereka.

Karena terkejut wartawan tak dapat berkata apa-apa ketika melihat ketidakmampuan atau keengganan polisi atau tentara untuk intervensi; dia malah melaporkan bahwa anggota polisi dan tentara tersebut sepakat dengan pemimpin Iban untuk tidak turut campur, mungkin untuk menghindari konflik yang lebih jauh dengan komunitas. Seorang pegawai lokal mengatakan bahwa itu adalah insiden lokal, pihak luar sama sekali tak perlu campur tangan atau malah membuatnya menjadi urusan publik, dan koordinator propinsi Kail Kalbar (konsorsium anti pembalakan liar) menunjukkan kekurangpahaman bagaimana orang lokal di sini sangat loyal dan bisa bekerja sama dengan orang asing bernama (Apeng) ketimbang pemerintahnya sendiri. Ia menyarankan

⁸ Petugas tersebut termasuk penjaga hutan tingkat kabupaten, jaksa, polisi dan tentara, beberapa di antara mereka bersenjata lengkap.

agar polisi propinsi mengambil alih masalah ini dari kepolisian tingkat kabupaten jika mereka tak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Mungkin koordinator Kail Kalbar memiliki “informasi dari dalam”, karena dua bulan berikutnya polisi nasional dan propinsi melancarkan Operasi Hutan Lestari yang berhasil menangkap beberapa warga Malaysia dan Indonesia (Cina, Iban, dan Melayu) yang terlibat dalam usaha kayu yang melintas batas. Operasi ini melarang transportasi kayu yang sudah ditebang melintasi perbatasan, langkah yang membuat orang-orang di tingkat lokal marah karena itu merupakan mata pencariannya. Mereka mengirimkan delegasi besar (sekita 200 orang) ke ibukota kabupaten, Putussibau, untuk mengupayakan penarikan larangan dengan membawa pendapat bahwa kayu berasal dari *hutan adat* dan pasar Indonesia sangat jauh. Hingga saat ini, tidak penyelesaian yang dicapai, kota di perbatasan yang tumbuh dari pergerakan manusia dan barang berubah menjadi kota hantu, dan Menteri Kehutanan M.S Kaban mengatakan bahwa komunitas lokal tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penebangan kayu untuk tujuan komersial (Kompas 2005b, 2005c; Media Indonesia 2005; Pontianak Post 2005a), menandakan berakhirnya sejarah perbatasan.

Vigilante dan Gengster dalam Perspektif yang Lebih Luas

Dua kasus di atas tadi menggambarkan proses penting mengenai kehidupan di perbatasan yang harus dimengerti untuk mengetahui permasalahan sumber daya dan sosial yang saat ini dihadapi di sana.

Orang Iban terbiasa dengan kebebasan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah lokal dalam untuk soal kriminal dan mereka tak mau kehilangan kebebasan tersebut. Seorang pegawai Hindia Belanda pada akhir abad ke sembilan belas menggambarkan mereka sebagai *een levendig en strijdlustig volk* (orang yang memiliki energi dan suka berkelahi),⁹ dan walaupun kita harus sangat berhati-hati atas penilaian tersebut, itu membicarakan vitalitas budaya dan percaya diri yang dikembangkan oleh hubungan unik yang dihasilkan antara negara dengan Iban yang berada di kedua sisi perbatasan pada satu setengah abad lalu. Itu sama sekali bukan kecelakaan bahwa wilayah yang diduduki Iban di sepanjang perbatasan Borneo Hindia Belanda dan Inggris Serawak merupakan daerah yang penuh ketegangan di antara dua kekuatan kolonial tersebut pada abad ke sembilan belas dan awal abad dua puluh, karena Iban sangat sulit untuk ditundukkan dan diajak berdamai (Wadley 2001, 2004).

⁹ Surat kepada NI Governor-General from Resident Tromp, 10 June 1891, Openbaar Verbaal 12 June 1894 No.13, ARA.

Walaupun setelah pasifikasi formal (pada 1886), pemerintah kolonial memperlakukan Iban dengan hati-hati supaya tidak membuat mereka marah. Contohnya, di kedua sisi perbatasan, Iban membayar pajak yang rendah dibandingkan dengan kelompok lokal lainnya – di Serawak, karena mereka harus membantu ekspedisi pemerintah, dan di Borneo Hindia Belanda, mungkin supaya seimbang dengan praktik yang berlaku di Serawak.¹⁰ Sebagai tambahan, sistem yang dikembangkan Belanda dengan menunjuk pemimpin —*temenggong* dan *patih*—menjadi semakin independen dengan berjalannya waktu, khususnya selama terjadinya peristiwa politik besar selama 1940-50-an. Lebih jauh, afinitas khusus Iban dengan Serawak didukung oleh pemerintah Serawak: Pada 1882 Charles Brooke, penguasa Inggris kedua Sarawak, tak berhasil menarik Iban dalam kendalinya, “walaupun jika satu porsi tertentu dari tanah dekat perbatasan tempat orang Dayak tinggal, diserahkan kepada penguasa Serawak”¹¹—adalah satu fakta yang masih dipertahankan dalam narasi sejarah Iban.

Tidaklah mengagetkan ketika melihat Iban menekankan kepentingannya dalam situasi khusus, walaupun itu mungkin berbahaya: Selama masa militerisasi di perbatasan pada 1960-70 an untuk menekan gerakan pemberontakan, Iban menolak menyerahkan senjata apinya kepada tentara Indonesia. Menuju ke markas tentara dengan penuh ritual adat dan dipimpin oleh *temenggong* dan *patih*, beberapa ratus orang lelaki yang kuat mengatakan kalau mereka mau menyerahkan senjata api jika tentara berjanji membuatkan pos tentara untuk melindungi ladang mereka dari serangan monyet dan babi. Hingga saat ini, tiga kecamatan yang didominasi oleh Iban merupakan satu-satunya tempat di kabupaten, atau bahkan di propinsi, warga diperbolehkan membawa senjata api tanpa perlu ijin dari polisi setempat.

Dengan memperhatikan latar belakang tadi, dan juga dalam konteks adanya pemerintahan yang terdesentralisasi dan polisi serta tentara yang terdemoralisasi mengikuti jatuhnya Soeharto, pembunuhan balas dendam atas Usnata bisa diterima, dan kami melihat sejumlah kontinuitas sejarah: Kuatnya perasaan otonomi budaya sangat terlihat di dalam kepercayaan bahwa adat harus lebih didahulukan ketimbang hukum nasional dan pemenuhan kepentingan-kepentingan Iban seluruhnya memiliki legitimasi. Kemampuan Iban untuk memobilisasi dengan cepat juga dapat ditemukan paralel sejarahnya pada ekspedisi pemburuan-kepala abad ke sembilan belas yang dapat berjumlah ratusan dan ribuan (Freeman 1960). Walaupun perubahan politik di Indonesia menyediakan mereka

¹⁰ Alasan petugas bahwa “kemampuan mendapatkan uang “ orang Iban rendah, tetapi ini tidak benar bagi kelompok Dayak lainnya yang berada di Kapuas Hulu yang juga miskin dan jauh dari pasar (Surat kepada NI Governor-General from Resident Tromp, 4 April 1894, Openbaar Verbaal 6 June 1895 No. 12, ARA).

¹¹ Surat kepada NI Governor-General dari Charles Brooke, 25 September 1882, Mailrapport 1882 No. 1066, ARA.

ruang tambahan untuk beroperasi setelah 1998, Iban yang terlibat dalam peristiwa Usnata tidak dapat terlibat jika tidak ada preseden sejarah yang telah disebutkan tadi.

Berkaitan dengan kasus gengsterisme, dua faktor tambahan mesti dilihat. Pertama, sebagai hasil dari proses desentralisasi, pemerintah kabupaten memiliki kekuasaan lebih dibanding dulu, dan pegawai Kapuas Hulu District melihat bisnis kayu yang melintasi perbatasan sebagai kesempatan baik mengembangkan ekonomi perbatasan, yang telah lama tidak diperhatikan pemerintah pusat. Karena dukungan keuangan dari pusat berkurang, pegawai lokal harus mencari sumber-sumber keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan pegawainya. Kedua, banyak Iban lokal (bersama dengan pegawai kabupaten) yang tidak memiliki pandangan sama dengan pemerintah pusat atau propinsi mengenai legalitas aktivitas bisnis kayu saat ini, dan mereka melihat campur tangan “pihak luar” seperti yang disebutkan di atas merupakan pelanggaran prinsip otonomi. Pasifnya polisi dan tentara di tingkat kabupaten dapat dilihat sebagai sikap kehati-hatian atas keuntungan ekonomi yang mereka dapatkan dari bisnis kayu dan sikap respek atas kemampuan Iban dalam mengambil tindakan.¹²

Sesudah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada 1998, pengusaha kayu etnis Cina Malaysia melintasi perbatasan Kalimantan Barat yang panjang dan tak terjaga baik guna membangun bisnis kayu. Mereka kerap kali bekerja sama dengan komunitas lokal yang sangat membutuhkan pendapatan dan menikmati penerimaan tidak resmi dari pegawai kabupaten. Operasi ini bisa berjalan dalam situasi ekonomi dan politik yang kondusif yang ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan kayu tropis, mudahnya akses ke perbatasan melalui jaringan jalan (yang semula ditujukan untuk keamanan nasional). Komunitas lokal melihat bahwa hutan di daerah perbatasan sebagai hutan tradisional mereka, dan pemanenan kayu atas hutan tersebut merupakan kesepakatan tingkat lokal.¹³ Makanya bisnis dapat berjalan dengan lancar, pengusaha kayu menyuap pegawai penting kabupaten dan kecamatan, termasuk polisi, tentara dan petugas imigrasi di perbatasan, merupakan satu fakta yang diketahui oleh penduduk perbatasan.

¹² Orang sipil lokal, polisi, dan tentara tidaklah lokal, tetapi berasal dari berbagai tempat di propinsi atau luar propinsi seperti Jawa dan Bali. Memperhatikan hubungan kegiatan lintas batas dan ilegalitas, sangat sulit untuk menilai bagaimana petugas lokal terlibat lebih dari sekadar memberikan fasilitas dan mengumpulkan cukai terhadap aktivitas tersebut pada wilayah mereka.

¹³ Walaupun komunitas terbelah dalam isu panen kayu dan kerja sama dengan bos kayu dari Malaysia, sebagian komunitas cukup senang dengan aturan, walaupun ketegangan muncul belakangan ini sebagai akibat samping dari usaha kayu yang muncul seperti polusi air (Suara Pembaruan 2004c).

Di kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, proses tersebut melibatkan pengusaha Malaysia (*tauke*) dan Iban. Konsekuensi dari afinitas budaya dan ekonomi yang panjang dengan Serawak dan setelah sekian lama dipinggirkan oleh pemerintah pusat dan propinsi, banyak Iban di perbatasan memiliki sedikit komitmen terhadap negaranya sendiri. Mereka sama sekali tidak melihat adanya dilema dalam bekerja sama dengan tukei dari Malaysia¹⁴ (dan pekerja Iban dari Malaysia), yang sangat mengetahui kebiasaan dan bahasa Iban ketimbang pegawai pemerintah Indonesia. Iban sangat nyaman berhubungan dengan *tauke* dan saudara-saudaranya dari perbatasan. Sebagai tambahan, karena Iban sudah terlibat dalam pekerjaan yang mendapatkan upah di perbatasan sementara teman satu sukunya di Kalimantan merasakan tarikan yang sama dari Kalimantan, kegiatan ini mengenalkan satu perangkat hubungan baru bagi Iban yang selama ini terpisah, memperkuat hubungan etnik lintas-batas (Wadley and Eilenberg 2005).

Dalam tahun-tahun awal kegiatan bisnis kayu di lintas-batas, media tingkat nasional dan propinsi melaporkan secara sporadis kegiatan yang berlangsung di Kapuas Hulu (seperti, Jakarta Post 2000, 2002, 2003; Pontianak Post 2003a, 2003b). Namun kemudian, ketika volume penyelundupan di perbatasan semakin meningkat dan kehilangan sumber dayanya tak mungkin diabaikan, media sekali lagi mengarahkan perhatian ke daerah perbatasan yang jauh.¹⁵ Temanya kemudian menjadi eksploitasi oleh Malaysia atas sumber daya alam di Kalimantan Barat, dengan menuliskan kepala berita yang provokatif seperti “Malaysia memakan buah kita, sementara Indonesia menelan kulitnya” (Suara Pembaruan 2003) dan “Kapan kolonisasi Malaysia atas perbatasan Kalbar berakhir?” (Suara Pembaruan 2004b). Laporan yang bersifat nasionalistis juga mencakup kriminalisasi kegiatan lintas-batas: *tauke* dan pekerja Malaysia dilihat sebagai gengster bersenjata api, mengintimidasi komunitas lokal, dan “Gengster Cina Malaysia” menjadi kata yang sering didengar (Suara Pembaruan 2004a; Sinar Harapan 2004a, 2004c; Media Indonesia 2004).

Sebagai konsekuensi perubahan dalam keinginan politik, politisi tingkat nasional dan propinsi meminta pegawai kabupaten bertindak benar. Walaupun pemerintah kabupaten menjamin akan menyelesaikan soal dengan “gengster Malaysia,” usaha awal untuk melawan pembalakan liar di daerah perbatasan sangat sedikit dan setengah hati, dan orang-orang menilai pengungkapan yang dilakukan hanyalah “kelas teri” (Kompas 2003a, 2003b; Pontianak Post 2004), khususnya ketika pegawai kabupaten tidak cepat-

¹⁴ Sebelum beroperasi di Kalimantan Barat, Toke Malaysia telah beroperasi di Serawak wilayah Iban bertahun-tahun dan memakai Iban sebagai buruh karena mempercayai kejujuran dan kerja mereka

¹⁵ Beberapa kejadian pelanggaran pelintasan perbatasan menjadi isu hangat di media dan diplomasi (Kompas 2000a; Suara Pembaruan 2000).

cepat mengakhiri hubungan lintas-batas yang amat menguntungkan. Tampaknya “gengsters” akan melanjutkan kegiatannya yang semakin melemah dengan dukungan dari pegawai kabupaten dan komunitas lokal (Kompas 2004b, 2004c, 2004d; Sinar Harapan 2004b). Operasi Hutan Lestari, bagaimanapun, tampaknya merubah keadaan. Namun yang sekarang kita lihat adalah upaya tingkat dari tingkat nasional dan propinsi untuk mengontrol pendapatan dari kabupaten, dengan alasan de-militasiasi daerah perbatasan dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di sepanjang perbatasan supaya mudah diawasi (Jakarta Post 2005; Pontianak Post 2005b). Masih merupakan teka-teki yang belum terjawab apakah komunitas di perbatasan akan mendapatkan keuntungan dari bisnis kayu ini.

Kesimpulan

Terletak di pinggiran negara Indonesia dan sangat dekat dengan negara tetangga yang memiliki hubungan budaya dan ekonomi dengan mereka, perasaan berbeda sangat kuat tertancap pada orang Iban – dalam pengertian keterpisahan dan keberbedaan dari pusat yang mencakup penduduk, ekonomi, budaya dan sejarah. Karakteristik umum kehidupan Iban di perbatasan adalah perasaan ditarik ke beberapa arah pada waktu yang bersamaan, tetapi kekuatan tarikan tersebut sangat tergantung dari derajat interaksi dan hubungan kedua belah pihak (Martinez 1994b:12). Walaupun demikian, penduduk di perbatasan dengan loyalitas sangat lemah kepada negaranya sendiri adalah mereka yang sangat kuat hubungannya dengan perbatasan (Martinez 1994a:19). Secara politik, Iban milik satu negara yang meminta loyalitas sangat kuat, tetapi secara etnis, emosi, dan ekonomi, mereka seringkali merasakan bagian dari yang lain, entitas bukan-negara (Baud and Schendel 1997:233), sesuatu yang terletak di negara lain. Bagi kebanyakan Iban, hubungan di perbatasan semakin kuat dibandingkan dengan pusat kekuasaan, ini menghasilkan perasaan lemah dalam hal rasa memiliki dan identitas.

Seringkali penduduk di perbatasan memelihara hubungan ekonomi lintas-batas walaupun mereka harus melanggar hukum nasional; dalam banyak kasus, mereka hanya memiliki sedikit pilihan karena pemerintah mereka gagal mengintegrasikan daerah perbatasan ke dalam ekonomi nasional yang lebih besar (seperti Baud and Schendel 1997:229). Penduduk perbatasan kemudian memperlihatkan kecenderungan untuk menghindari, mengelakkan atau melawan hukum yang mereka lihat sebagai campur tangan atas kepentingan mereka dan cara hidup mereka yang khas. Hukum kaku yang mengatur interaksi di perbatasan akan mengakibatkan konflik yang lebar dan penghindaran hukum (Martinez 1994b:12). Lebih jauh, perasaan ‘lain’ kepada negara seperti yang dialami oleh penduduk perbatasan meningkat karena kepentingan mereka sangat berbeda bahkan kadang-kadang berkonflik dengan kepentingan nasional. Mereka melihat diri sendiri sebagai kaum yang terpinggirkan dari satuan nasional yang besar,

banyak Iban yang seringkali merasakan bahwa pusat politik yang jauh tidak mengerti lingkungan khusus hidup di perbatasan.

Keadaan yang ambigu antara penyatuan dan pemisahan menjadi karakter khusus di perbatasan. Dengan adanya pemisahan dua negara beserta dengan rejim administratif dan peraturannya, perbatasan mungkin mendorong terjadinya satu “struktur kesempatan” bagi kegiatan-kegiatan seperti penyelundupan dan imigrasi, yang dianggap negara sebagai bertentangan dengan hukum (Anderson and O’Dowd 1999:597). Penyelundupan dan perdagangan tidak legal seringkali digambarkan sebagai “pekerjaan di perbatasan” (Wendl and Rösler 1999:13). Contohnya, Donnan dan Wilson (1999) mencatat bagaimana perbatasan internasional dapat “digunakan” (baca: perdagangan) dan “disalahgunakan” (baca: penyelundupan). Pada sisi lain, perbatasan memberikan kesempatan ekonomi dan mendorong aliran barang dan manusia secara dua arah, namun pada sisi lainnya kegiatan tadi juga memfasilitasi keuntungan melalui impor dan ekspor ilegal, seperti yang sudah kita lihat dalam penyelundupan kayu dari Kalimantan Barat. Proses yang melanggar hukum tersebut membentuk ekonomi subversif di perbatasan (1999: 87), yang sangat penting bagi kehidupan bagi banyak penduduk di perbatasan dan bahkan kekuatan ekonomi yang sangat penting di sana.

Tetapi skenario tipikal “tanah perbatasan” ini memberikan kita sebagian gambaran mengenai Iban di perbatasan, dan itu sama sekali tidak dimengerti tanpa menghubungkan dengan afinitas khusus yang dikembangkan Iban di Kalimantan Barat dengan Serawak. Bukan saja mereka merupakan minoritas di propinsinya sendiri, dipisahkan dari sebagian besar populasi yang lebih besar di negara tetangga yang mungkin lebih makmur, tetapi mereka diperlakukan khusus oleh pemerintah kolonial dan pemerintah nasional di kedua perbatasan. Ini membuat mereka memiliki satu ruang khusus untuk mengembangkan rasa otonomi, memperkuat rasa keterpisahan yang muncul sangat kuat pada penduduk perbatasan. Dalam kondisi setelah krisis ekonomi 1997 dan jatuhnya rejim Suharto pada 1998, mungkin sangat tidak begitu mengagetkan untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi apa adanya, mengingat pentingnya preseden sejarah.

Referensi

- American Heritage Dictionary. 2000. *The American Heritage Dictionary of the English Language*, 4th ed. Boston: Houghton Mifflin.
- Anderson, James, and Liam O’Dowd. 1999. “Borders, Border Regions and Territoriality: Contradictory Meanings, Changing Significance.” *Regional Studies* 33: 593-604.
- Antara. 2005. Kail Sesali Sembiaran Perampasan Mobil Bukti “Illegal Logging.” *Antara New Agency*, 15 January.

- Baud, Michiel, and Willem van Schendel. 1997. "Toward a Comparative History of Borderlands." *Journal of World History* 8: 211-242 .
- Colombijn, Freek. 2002. "Maling, Maling! The Lynching of Petty Criminals." In *Roots of Violence in Indonesia*, ed. Freek Colombijn and J. Thomas Lindblad, pp. 299-329. Leiden: KITLV Press.
- Donnan, Hastings, and Thomas M. Wilson. 1999. *Borders: Frontiers of Identity, Nation and State*. Oxford: Berg.
- Eilenberg, Michael. 2005. "Borderland Strategies – Fluid Borders and Flexible Identities: A Case of the Iban in West Kalimantan, Indonesia." Master's thesis, Department of Anthropology and Ethnography, University of Aarhus, Denmark.
- Equator Online. 2004a. "Tangkap Apeng, Kenapa Baru Sekarang." *Equator Online*, 9 August.
- Equator Online. 2004b. "Tangkap Apeng: Masyarakat Masih Tunggu Janji Kapolda." *Equator Online*, 14 September.
- Fariastuti. 2002. "Mobility of People and Goods across the Border of West Kalimantan and Sarawak." *Antropologi Indonesia* 67: 94-104.
- Flynn, Donna. 1997. "'We are the border': Identity, Exchange, and the State along the Benin-Nigeria Border." *American Ethnologist* 24: 311-330.
- Freeman, J. D. 1960. "On the Concept of the Kindred." *The Journal of the Royal Anthropological Institute* 91: 192-220.
- Jakarta Post. 2000. "Illegal Logging Rampant along Indonesian-Malaysian Border." *Jakarta Post Online*, 23 May.
- Jakarta Post. 2002. "Loggers Head for Heart of Betung Kerihun National Park." *Jakarta Post*, 26 November.
- Jakarta Post. 2003. "West Kalimantan Unable to Halt Illegal Logging." *Jakarta Post Online*, 18 March.
- Jakarta Post. 2005. "Military Wants Battalions in Border Areas." *Jakarta Post Online*, 8 August.
- Kompas. 2000a. "Malaysia Belum Tanggapi Soal Pencurian Kayu." *Kompas Cyber Media Online*, 4 July.
- Kompas. 2000b. "Terdakwa Tewas Dihakimi Massa." *Kompas Cyber Media*, 14 December.
- Kompas. 2003a. "Operasi Wanalaga II Tahan 116 Pelaku Penebangan Liar." *Kompas Cyber Media*, June 17.
- Kompas. 2003b. "Cukong Kayu Illegal Asal Malaysia Belum Tertangkap." *Kompas Cyber Media*, 23 July.
- Kompas. 2004a. "Empat Warga Malaysia Ditangkap Terlihat Pencurian Kayu Diperbatasan." *Kompas Cyber Media*, 11 March.
- Kompas. 2004b. "Pengiriman Kayu Illegal ke Malaysia Masih Terjadi." *Kompas Cyber Media*, 28 July.

- Kompas. 2004c. "Dukung Kapolda Tuntaskan Illegal Logging." *Kompas Cyber Media*, 11 August.
- Kompas. 2004d. "Hutan Makin Rusak, Industri Kayu Makin Sulit." *Kompas Cyber Media*, 25 September.
- Kompas. 2005a. "Wartawan TV5 dan Tim olah TKP Digelandang Massa di Pontianak." *Kompas Cyber Media*, 15 January.
- Kompas. 2005b. "Warga Protes Operasi Hutan Lestari." *Kompas Cyber Media*, 23 March.
- Kompas. 2005c. "Menhut: Masyarakat Adapt Dilarang Terbitkan Izin Penebangan Hutan." *Kompas Cyber Media*, 29 March.
- Martinez, Oscar J. 1994a. *Border People: Life and Society in the U.S.-Mexico Borderlands*. Tucson: University of Arizona Press.
- Martinez, Oscar J. 1994b. "The Dynamics of Border Interaction: New Approaches to Border Analysis." In *Global Boundaries, World Boundaries: Volume 1.*, ed. Clive H. Schofield, pp 1-15. London: Routledge.
- McCarthy, John F. 2000. "Wild Logging": *The Rise and Fall of Logging Networks and Biodiversity Conservation Projects on Sumatra's Rainforest Frontier*. Occasional Paper No. 31. Bogor: Center for International Forestry Research.
- McCoy, Alfred W. 1999. "Requiem for a Drug Lord: State and Commodity in the Career of Khun Sa." In *States and Illegal Practices*, ed. Josiah Heyman, pp. 129-167. Oxford: Berg.
- Media Indonesia. 2004. "Belum Ada Fakta Gangster Malaysia Kuasai Perbatasan." *Media Indonesia Online*, 25 April.
- Media Indonesia. 2005. "Masyarakat Kapuas Minta Polisi Tidak Segal Kayu Hutan Adat." *Media Indonesia Online*, 29 March.
- Paredes, Americo. 1958. *With a Pistol in His Hand: A Border Ballad and Its Hero*. Austin: University of Texas Press.
- Pontianak Post. 2000a. "400 Massa Bersenjata serang PN Kapuas Hulu." *Pontianak Post Online*, 14 December.
- Pontianak Post. 2000b. "Keluarga Usnata Lapor ke Presiden." *Pontianak Post Online*, 19 December.
- Pontianak Post. 2003a. "Mafia Illegal Logging, Cukong atau Aparat." *Pontianak Post Online*, 22 June.
- Pontianak Post. 2003b. "Sepekan, Ratusan Truk Kayu Keluar Masuk Badau." *Pontianak Post Online*, 16 September.
- Pontianak Post. 2004. "Tim Wanalaga Sita Kayu Illegal di Perbatasan." *Pontianak Post Online*, 16 March.
- Pontianak Post. 2005a. "Masyarakat Perbatasan Minta Solusi Illegal Logging." *Pontianak Post Online*, 4 April.
- Pontianak Post. 2005b. "Buka Lahan Sawit Sepanjang Perbatasan: Strategi Baru Amankan Batas Malaysia-Kalimantan." *Pontianak Post Online*, 10 May.

- Riwanto Tirtosudarmo. 2002. "West Kalimantan as 'Border Area': A Political-Demography Perspective." *Antropologi Indonesia* Special Issue: 1-14.
- Schendel, Willem van, and Itty Abraham. Forthcoming. *Illicit Flows and Criminal Things: States, Borders, and the Other Side of Globalization*. Bloomington: Indiana University Press.
- Siburian, Robert. 2002. "Entikong: Daerah tanpa Krisis Ekonomi di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak." *Antropologi Indonesia* 67: 87-93.
- Sinar Harapan. 2004a. "'Gangster' Bersenjata Malaysia Dilarporkan Kuasai Perbatasan." *Sinar Harapan*, 22 April.
- Sinar Harapan. 2004b. "Pembalakan Liar di Perbatasan Indonesia-Malaysia (3-Habis) Hukum Lemah, Hutan pun Hilang." *Sinar Harapan*, 7 May.
- Sinar Harapan. 2004c. "Cukong Kayu Malaysia Masuk Daftar Buronan." *Sinar Harapan*, 29 October.
- Suara Pembaruan. 2000. "Sengketa Perbatasan yang Berawal dari Berebut Hasil Hutan." *Suara Pembaruan*, 11 September.
- Suara Pembaruan. 2003. "Lika-liku Praktik Illegal Logging di Kalbar: Malaysia Makan Buahnya, Indonesia Telan Getahnya." *Suara Pembaruan*, 8 August.
- Suara Pembaruan. 2004a. "Mafia Malaysia Babat Hutan di Perbatasan Kalbar." *Suara Pembaruan*, 22 April.
- Suara Pembaruan. 2004b. "Kapan 'Penjajahan' Malaysia di Perbatasan Kalbar Berakhir?" *Suara Pembaruan*, 9 May.
- Suara Pembaruan. 2004c. "Warga Perbatasan Diteror Cukong Kayu." *Suara Pembaruan*, 22 December.
- Tagliacozzo, Eric. 2001. "Border Permeability and the State in Southeast Asia: Contraband and Regional Security." *Contemporary Southeast Asia* 23: 254-274.
- Wadley, Reed L. 1998. "The Road to Change in the Kapuas Hulu Borderlands: Jalan Lintas Utara." *Borneo Research Bulletin* 29: 71-94.
- Wadley, Reed L. 2001. "Trouble on the Frontier: Dutch-Brooke Relations and Iban Rebellion in the West Borneo Borderlands (1841-1886)." *Modern Asian Studies* 35: 623-644.
- Wadley, Reed L. 2004. "Punitive Expeditions and Divine Revenge: Oral and Colonial Histories of Rebellion and Pacification in Western Borneo, 1886-1902." *Ethnohistory* 51: 609-636.
- Wadley, Reed L., and Michael Eilenberg. 2005. "Autonomy, Identity and 'Illegal' Logging in the Borderland of West Kalimantan, Indonesia." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 6: 19-34.
- Wendl, Tobias, and Michael Rösler. 1999. "Introduction—Frontiers and Borderlands: The Rise and Relevance of an Anthropological Research Genre." In *Frontiers and Borderlands: Anthropological Perspectives*, ed. Michael Rösler and Tobias Wendl, pp. 1-27. Frankfurt am Main: Peter Lang.